



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI
Nomor .../PAN.MK/ARPK/.../2021**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun **dua ribu dua puluh satu** pukul ... WIB, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, dengan registrasi perkara:

NOMOR .../PHP.GUB-BUP-KOT-XIX/2021

diajukan oleh:

... dan ..., Pasangan **Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota** ... Tahun 2020, Nomor Urut Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal ... memberi kuasa kepada ... dkk.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ...

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Perkara tersebut segera akan ditetapkan hari sidangnya dan kepada Pemohon, Termohon, dan Bawaslu segera akan diberitahukan mengenai ketetapan tersebut.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.**



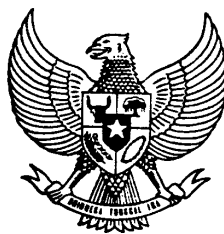
Digital Signature

Panitera
Muhidin, NIP. 19610818 198302 1 001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik/digital (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI
Nomor .../PAN.MK/ARPK/.../2021**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun **dua ribu dua puluh satu** pukul ... WIB, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, dengan registrasi perkara:

NOMOR .../PHP.GUB-BUP-KOT-XIX/2021

diajukan oleh:

... dan ..., Pemantau Pemilihan **Provinsi/Kabupaten/Kota ...** Tahun 2020. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal ... memberi kuasa kepada ... dkk.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ...

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Perkara tersebut segera akan ditetapkan hari sidangnya dan kepada Pemohon, Termohon, dan Bawaslu segera akan diberitahukan mengenai ketetapan tersebut.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.**



Digital Signature

Panitera
Muhidin, NIP. 19610818 198302 1 001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id